

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) EKONOMI
BERGULIR KELOMPOK DI KELURAHAN SAIL KECAMATAN
TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU**

SULASTRI

1001132435

Jurusan: Sosiologi

FISIP

DOSEN PEMBIMBING: Drs. Yoskar Kadarisman

Kampus Bina Widya Jl.HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277,35675

e-mail: sulastr12@ymail.com

ABSTRAC

PNPM MP is independent urban constitute to process changing one expected of condition of society which over a barrel, as free as unattached on something that wills be civic society. agglomerate economic activity unsecured seeds money added fund and also launching forth for revenue enhancement indigent society. Present programs PNPM MP matter for society hole in the wall seed money increase. Since supervisory reducing of managing PNPM MP nots borrower want to back PNPM MP loan installment and PNPM MP'S fund loan incorrectly target which necessarily indigent society that utilizes to lent fund is not economic society good. As about problem: one that PNPM MP'S performing? And there is factor even funds unsecured failing economic agglomerate go delinquent one?

This research intent to know performing form PNPM MP at Kelurahan Sail. Any kind unsecured failing factors funds. Observational type is *simple random is sampling* with deskritif's quantitative approaching. Data requirement cover acquired primary data through koesioner's inlay result and secondary. Total population 62 arrearses and sample amount 31 person.

Of research result can know to mark sense target fault hit PNPM MP fund lending its reducing observation, socialization, *monitoring*, checking hits effort of organizer. Meanwhile of bust causal factor fund borrower effort which is carried on not walking, donation money assumption, abilities inappropriate effort, no wish refunds and its reducing to agglomerate solidarity.

Key word: PNPM MP performing, motivation and failing factors

I. Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, pada saat ini banyak dibicarakan masalah kemiskinan di dunia. Indonesia salah satu Negara memiliki permasalahan kemiskinan yang belum mampu mengentaskan masalah tersebut. Kemiskinan senantiasa menjadi masalah yang tidak mudah untuk terselesaikan, kemiskinan di Indonesia semakin hari semakin memperhatinkan. Dibentuklah program-program pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan sebuah wadah yang berbasis internasional untuk memberantas atau menanggulangi kemiskinan melalui pembangunan millennium (MDGs). Dimana tujuan pembangunan millennium tersebut adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit menular, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global.

Upaya dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Program-program pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan tetapi belum juga mendapatkan titik penerangan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Program Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan bagian dari program pembangunan nasional (PROPENAS). Program penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan pada tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang secara berkelanjutan. Agar tidak terjadi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah maka dibutuhkan kepedulian antar sesama dan membentuk kemitraan masyarakat dengan pemerintah. Program ini sangat baik untuk membentuk kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) pada masyarakat di masa yang akan datang dan menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan diperkotaan yang berakarkan kerakyatan.

Lembaga Kepemimpinan Masyarakat yang mengakar, refrensif dan di percaya tersebut (secara generic disebut badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/LKM) di bentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai gotong-royong dan nilai-nilai kemasyarakatan melalui musyawarah mencapai mufakat sebagai pondasi modal sosial (*sosial capital*) kehidupan masyarakat. Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat itu diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Menurut BKKBN kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja, dan berpergian, bagian terluas rumah berlantai tanah, dan tidak mampu membawa anggota ke sarana kesehatan (Tim Crescent, 2003 : 5).

Jumlah penduduk dalam Kota Pekanbaru relative besar yang tersebar di kantong-kantong kemiskinan pada daerah pemekaran baru. Menurut BPS kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Kemiskinan diatas diukur dengan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2009-2011 salah satu kecamatan memiliki penduduk miskin paling banyak adalah Kecamatan Tenayan Raya.

Untuk membangkitkan perekonomian masyarakat yang lemah dan dapat memperdayakan masyarakat melalui program yang dirancang oleh pemerintah yakni PNPM Mandiri 30 April 2007 No:25/Kep/MENKO/KESRA/VII/2007 yang terdiri dari PNPM-Mandiri adalah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melakukan pendampingan proses pembelajaran masyarakat melalui penyandraan kritis agar dapat memecahkan masalah sendiri. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan pada satu saat akan menjadi masyarakat madani. Program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PNPM-MP adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan ekonomi bergulir kelompok yaitu kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok yang mempunyai usaha atau memulai usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan ekonomi bergulir perkotaan, kemudahan akses usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan meperkuat kelembagaan.

Berkaitan dengan hal yang diatas adapun pemanfaat anggota dana ekonomi bergulir mengalami kendala. Terdapat 15 anggota ekonomi bergulir mengalami penunggakan, sehingga perputaran modal itu lama. Permasalahan penunggakan dana ekonomi bergulir ini menyebabkan anggota yang lain tidak dapat meminjam karena kententuannya peminjam hanya bisa meminjam sebanyak-banyaknya 4 kali pinjaman dengan catatan lancar. Karena penunggakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut yaitu

1. Karena anggota kelompok yang menerima dana ekonomi bergulir tidak mengerti dana PNPM-MP dikembalikan.
2. Karena anggota yang menerima dana ekonomi bergulir beranggapan uang hibah dari pemerintah untuk masyarakat miskin.
3. Sikap mental dan perilaku masyarakat miskin yang masih menggantungkan diri pada bantuan pihak luar, kurang bekerja keras, apatis, tidak percaya diri akan kemampuan sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti tentang pelaksanaan program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya.

2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pertanyaan mendasar bagi peneliti ini adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan program PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail ?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong kegagalan pelaksanaan program PNPM-MP 2011 ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail ?

3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, di harapkan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PNPM-MP dalam rangka kesejahteraan masyarakat guna pengentasan kemiskinan di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan PNPM-MP dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka pelaksanaan PNPM-MP dalam rangka pengentasan kemiskinaan.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran sosiologi secara teoritis dan akademis bagi pengembangan ilmu sosiologi.

5. Tinjauan Teori

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2007 : 320).

Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002 dalam Tim Crescent, 2003 :4). Orang miskin umumnya tidak mampu membaca karena tdiak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit akibat kekurangan air bersih. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (world bank dalamTim Crescent, 2003 : 4).

Ciri masyarakat miskin diambil dari berbagai sumber rujukan adalah:

1. Secara politik yaitu tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
2. Secara sosial yaitu tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada.
3. Secara ekonomi yaitu rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan pendidikan, keterampilan yang berdampak pada penghasilan.

4. Secara budaya dan tata nilai yaitu terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM, seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek, dan fatalisme.
5. Secara lingkungan hidup yaitu rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup, seperti air bersih dan penerangan.

Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang (Fernandez, 2000 dalam Tim Crescent, 2003 : 5)

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relative. Seseorang dikatakan miskin secara absolute apabila tingkat pendapatannya lebih rendah dari pada garis kemiskinan absolut atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.

Kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab berikut.

1. Rendahnya taraf pendidikan, taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya fikir, dan prakarsa.
3. Terbatasnya lapangan kerja, keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
4. Kondisi keterisolasian, banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya(Kartasasmita, 1996 : 234-235).

Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan teman-temannya. Teori kebutuhan McClelland berfokus pada tiga kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan berprestasi: dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil.
2. Kebutuhan berkuasa: kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya.
3. Kebutuhan berafiliasi: keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab ([.wikipedia /Motivasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi)).

McClelland mengatakan bahwa kebutuhan yang kuat akan afiliasi akan mencampuri objektivitas seseorang. Sebab, jika ia merasa ingin disukai, maka ia akan melakukan apapun agar orang lain suka akan keputusannya.

1. Kebutuhan akan prestasi

Adalah kebutuhan seseorang untuk memiliki pencapaian signifikan, menguasai berbagai keahlian, atau memiliki standar yang tinggi. Orang yang memiliki n-ach tinggi biasanya selalu ingin menghadapi tantangan baru dan mencari tingkat kebebasan yang tinggi. Sebab-sebab seseorang memiliki n-ach yang tinggi di antaranya adalah pujian dan imbalan akan kesuksesan yang dicapai, perasaan positif yang timbul dari prestasi, dan keinginan untuk menghadapi tantangan.

2. Kebutuhan akan Kekuasaan

Kebutuhan ini didasari oleh keinginan seseorang untuk mengatur atau memimpin orang lain. Menurut McClelland, ada dua jenis kebutuhan akan kekuasaan, yaitu pribadi dan social.

McClelland mengatakan bahwa kalau dalam masyarakat ada banyak n-Ach yang tinggi dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Orang n-Ach yang tinggi memiliki kebutuhan untuk berprestasi mengalami kepuasan bukan karena mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerjanya tersebut di anggapnya sangat baik (Arif Budiman, 2000 : 21).

McClelland sendiri menetapkan beberapa kriteria manusia-manusia yang memiliki n-Ach yang tinggi atau manusia-manusia yang haus akan karya unggul. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manusia haus akan karya unggul adalah mereka yang tertarik oleh kecemerlangan karya *for its own sake*, dan bukan karena ganjaran (seperti pahala, balas budi) yang didapat dari padanya, baik berupa uang, prestise, ataupun kekuasaan.
2. Manusia yang haus akan karya unggul berkecendrungan pada pencapaian yang sukses daripada menghindari kegagalan.
3. Bila dibandingkan dengan orang biasa (mereka yang ber-n-Ach rendah) manusia yang haus akan karya unggul lebih tertarik oleh tindakan alternatif (alternatif model) yang secara realitas memiliki peluang keberhasilan yang besar.
4. Memiliki ketajaman dalam memilah situasi, mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikannya dari pada hanya bergantung pada kesempatan (Yusmar Yusuf, 1991 : 67).

6. Metode Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Tenayan Raya terdapat empat kelurahan salah satu kelurahan Sail. Keempat kelurahan mendapatkan dana PNPM-MP tetapi peneliti mengambil lokasi ini dipilih karena merupakan kelurahan yang mendapatkan program PNPM-MP dan juga Kelurahan yang memiliki banyaknya masyarakat miskin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *simple random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dengan penarikan sampel 25%. Dimana peneliti mengambil sampel pemanfaat dana

PNPM-MP ekonomi bergulir kelompok yang menunggak berjumlah yaitu 62 responden. Maka responden penelitian berjumlah 31 responden.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya

Penggunaan dana PNPM-MP dalam ketentuannya digunakan oleh masyarakat miskin. Dimana program ini bertujuan menambah modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan modal tambahan maupun memulai usahanya menjadi lebih baik. Program ini sangat cocok untuk masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan keseimbangan pengeluaran sehingga dengan adanya usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan, dan kesejahteraan keluarganya.

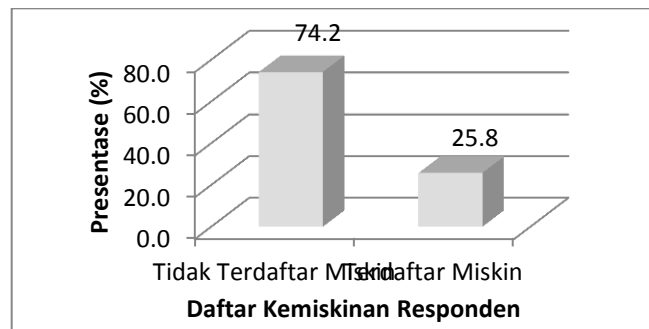
Kemiskinan diartikan suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf yang dianggap manusiawi. Orang miskin umumnya tidak mampu membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit akibat kekurangan air bersih. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas. Ciri masyarakat miskin diambil dari berbagai sumber rujukan adalah :

- a. Secara politik yaitu tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka
- b. Secara sosial yaitu tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada.
- c. Secara ekonomi yaitu rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan pendidikan, keterampilan yang berdampak pada penghasilan.
- d. Secara budaya dan tata nilai yaitu terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM, seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek, dan fatalisme.
- e. Secara lingkungan hidup yaitu rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup, seperti air bersih dan penerangan.

Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang (Fernandez, 2000 dalam Tim Crescent). Jika dihubungkan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh peminjaman dana PNPM-MP masyarakat yang dapat meminjamkan atau memanfaatkan dana tersebut sebagian besar masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kriteria skim peminjam dana PNPM-MP harus masyarakat miskin. Dimana pengertian maupun ciri-ciri masyarakat miskin dari berbagai rujukan yaitu dimana masyarakat yang tidak sesuai pendapatan dengan pengeluaran dari jumlah anggota keluarganya. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pihak peminjam dengan petugas untuk mencapai tujuan dari program tersebut untuk mengsejahterakan masyarakat miskin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1
Distribusi Responden Berdasarkan Masyarakat miskin



Sumber : Olahan Data 2013

Berdasarkan gambar 5.10 responden yang terdaftar sebagai masyarakat miskin yaitu terdapat 25,8% atau berjumlah 8 responden. Dimana kriteria atau ketentuan peminjam dari teknis kegiatan pinjaman bergulir kelompok telah sesuai dengan ketentuan masyarakat yang terdaptar masyarakat miskin. Masyarakat miskin tentunya memiliki pendapatan rendah. Dimana program dana PNPM-MP telah tepat sasaran untuk meningkatkan usaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.

Sedangkan dari sisi lain sebagian besar masyarakat yang mendapatkan dana PNPM-MP yaitu terdapat 74,2% responden berjumlah 23 responden tidak terdaftar masyarakat miskin. Disini tidak adanya kesesuaian dengan kriteria atau ketentuan dari skim peminjam. Dimana responden ini jika dihubungkan dengan pendapatan telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Termasuk masyarakat yang sejahtera, dapat disimpulkan bawah peminjaman dana PNPM-MP tidak tepat sasaran untuk masyarakat miskin. Program PNPM-MP merupakan sebagai lembaga jasa keuangan simpan pinjam bergulir kelompok keberadannya sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin, khususnya sebagai lembaga untuk memfasilitasi jasa pembiayaan usaha ekonomi mikro yang memiliki permasalahan kekurangan modal usaha. Salah satu tujuan dari program PNPM-MP adalah pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal (kelembagaan PNPM-MP) dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Kapasitas kelembagaan untuk mencapai tujuannya diukur dari : strategi kepemimpinan yang dipakai, perencanaan program, manajemen dan pelaksanaannya, alokasi sumber daya yang dimiliki dan hubungan dengan pihak luar.

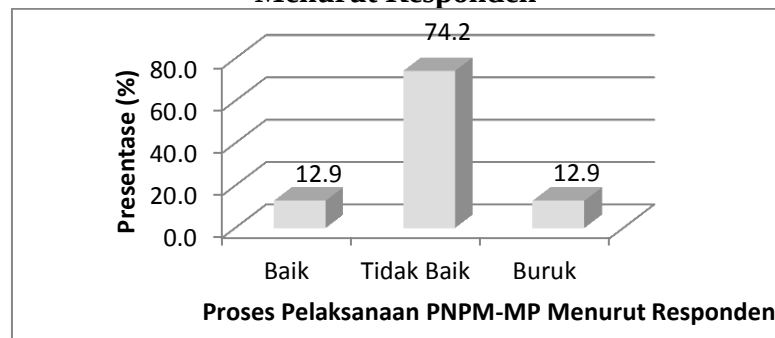
Kapasitas kelembagaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari:

1. Strategi kepemimpinan ketua LKM dalam menyebarluaskan kriteria pengelolaan PNPM-MP dan kriteria pemanfaat dana tersebut. Kesempatan yang diberikan untuk akses terhadap dokumen keuangan oleh pengelola UPK terhadap LKM.
2. Kriteria calon peminjam yang usaha produktif untuk membantu masyarakat miskin.
3. Manajemen dan pelaksanaannya menyangkut bagaimana kesesuaian laporan bulanan dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis (Pedum dan Jukni) pinjaman bergulir yang disampaikan ke KLM.

4. Alokasi sumber daya yang dimiliki dilihat dari besarnya alokasi dana dan realisasinya, jumlah responden yang menunggak.
5. Hubungan dengan pihak luar bagaimana keterbukaan informasi dan publikasi tentang manajemen pengelolaan (hasil musyawarah, alokasi dana, besarnya penyerapan dan nama responden).

Tingkat pelaksanaan program PNPM-MP Kelurahan Sail dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2
Proeses Pelaksanaan Program PNPM-MP Kelurahan Sail
Menurut Responden



Sumber : Data Olahan 2013

Kinerja para pengurus dalam melayani pemanfaatan PNPM-MP Kelurahan Sail para peminjam yang menunggak dapat dilihat pada gambar diatas yang diungkapkan oleh responden sebagai pemanfaat dana PNPM-MP di Kelurahan Sail kemudian dinilai dengan kategori baik, sedang hingga buruk. Responden menyatakan dalam pelaksanaanya para pengelola dalam pelayanan, penyampaian informasi mengenai PNPM-MP. Keterbukaan mengenai laporan keuangan, membangun transparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan serta rapat-rapat terbuka. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat.

Pada gambar diatas terlihat presentase baik pada indikator baik, baik yang dimaksud adalah adanya keterbukaan pihak pengelola PNPM-MP mengenai anggaran dana apa saja kegiatan yang dilakukan, dan tidak hanya itu. Semua responden yang peneliti tanyakan mengaku tidak ada keterbukaan petugas mengenai sirkulasi laporan kegiatan tersebut. Jawaban tidak baik yaitu terdapat dengan presentase 74,2% (23 responden) dimana adanya ketertutupan mengenai laporan dana dan sirkulasi mengenai laporan kegiatan dan jarang diadakan rapat-rapat terbuka mengenai PNPM-MP. Adapun jawaban baik yaitu dengan presentase 12,9% (4 responden) mereka mengetahui tentang informasi mengenai PNPM-MP. Sedangkan jawaban buruk dengan presentase 12,9% (4 responden) tidak mengetahui tentang PNPM-MP.

B. Faktor-Faktor Penyebab Penungjakan Pembayaran Pinjaman Dana PNPM-Mandiri Perkotaan

Adapun fakto-faktor terjadinya penungjakan oleh peminjam dana PNPM-MP di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya dikarekan sebagai berikut ini:

Faktor kegagalan yaitu usaha yang dijalankan tidak berjalan, usaha yang dijalankan responden tidak produktif atau usaha yang asal-asalan sebagai syarat peminjaman dana PNPM-MP dan akibatnya usaha yang dijalankan responden tutup atau bangkrut. Untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan itu (Homans, 1974). Dikaitkan dengan teori homans dimana suatu tindakan dilakukan diberi hadiah maka semakin besar kemungkinan orang melakukan itu. Dan sebaliknya apabila tindakan tersebut tidak diberikan hadiah atau ganjaran maka akan jarang dilakukan. Maksud dari peneliti disini adalah responden mengalami penunggak bila tidak diberikan ganjaran maka mereka tidak peduli mengenai pembayaran angsuran dana PNPM-MP.

Menjelaskan prilaku sosial yang mendasar Homans bergantung pada dua bentuk teori yakni prilaku sosial dan sifat-sifat dasar ekonomi. Jadi keberhasilan suatu usaha berdasarkan perilaku sosial seseorang, apabila hidup mereka ingin lebih baik maka responden menerima suatu perubahan yang lebih baik. Program PNPM-MP dimana suatu program untuk pinjaman bergulir penambahan modal usaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya harus ada keterkaitan antara satu dengan yang lain yaitu sifat-sifat dasar ekonomi.

Apabila responden memiliki sifat-sifat dasar ekonomi maka usaha yang akan dijalankan berkembang dengan baik. Sehingga dana dari PNPM-MP akan dibayarkan melalui keuntungan dari usaha tersebut. Tetapi sebaliknya responden yang mengalami penunggakan karena sebagian usaha mereka mengalami kegagalan atau bangkrut. Solusinya perlu adanya sifat-sifat dasar ekonomi apabila membuka usaha. Untuk memutar modal itu kembali sehingga usaha yang dikembangkan berkembang dengan baik.

Dua bentuk teori itu dapat digabungkan menjadi satu karena keduanya menggambarkan bahwa perilaku manusia sebagai suatu fungsi dari apa yang dibayarnya: “jumlah dan jenisnya tergantung atas jumlah dan jenis dari ganjaran dan hukuman yang ia dapatkan”. Keduanya menggambarkan pertukaran aktivitas manusia dari sudut pandang ganjaran dan pengeluaran dan menjelaskan aktifitas-aktifitas tersebut dari sudut pandang ongkos-ongkos tindakan tertentu dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh responden sebagai ganjarannya.

Dari sudut pandang ini, interaksi sosial merupakan pertukaran barang atau jasa dimana setiap responden, berjuang untuk mengurangi ongkos dan memaksimalkan keuntungan. Rumusan yang muncul dari pertukaran ini adalah sebagai berikut:

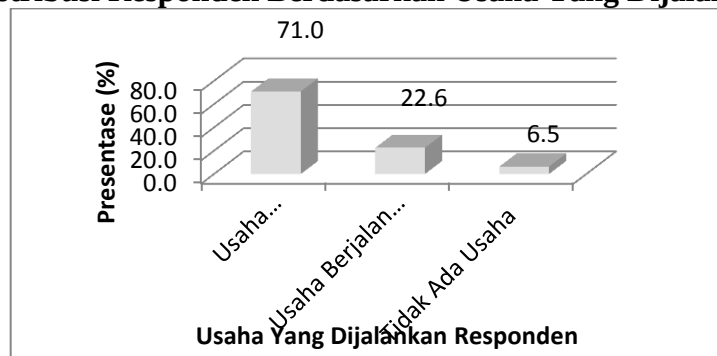
- a. Keuntungan
- b. Ganjaran
- c. Ongkos

Tetapi disini responden tidak menerima ganjaran akan aktivitas yang dilakukannya. Karena masih ada sikap yang menggantungkan terhadap pemerintah. Masih kurangnya kesadaran akan keuntungan yang didapatkan dari usaha sehingga apa ganjaran yang didapatkan terhadap ongkos yang dikeluarkan. Apabila mereka menyadari akan hal semua itu maka perilaku itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Propesi yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. Demikian juga sebaliknya makin tinggi biaya ancaman hukuman (*punishment*) yang akan diperoleh makin kecil

kemungkinan tingkah laku yang serupa diulang. Adanya hubungan berantai antara berbagai stimulus dan antara berbagai tanggapan.

Untuk lebih jelasnya usaha yang dijalankan responden yang masih berjalan dan usaha tersebut mengalami kebangkrutan. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 6.1
Distribusi Responden Berdasarkan Usaha Yang Dijalankan



Sumber : Olahan Data 2013

Berdasarkan gambar 6.1 sebagian besar usaha yang dijalankan oleh responden tutup atau bangkrut yaitu dengan presentase 71,0% (22 responden). Sebagai alasan kenapa usaha mereka tutup dikarenakan usaha dijalankan secara asal-asalan. Usaha yang tidak berkelanjutan sehingga mengalami kebangkrutan. Usaha dijalankan responden untuk syarat mendapatkan uang pinjaman dari PNPM-PM. Dimana ketentuan dari PNPM-MP harus memiliki usaha. Dikaitkan dengan teorinya Homans dimana jika tingkah laku atau kejadian yang sudah lewat dalam konteks stimulus dan situasi tertentu memperoleh ganjaran, maka besar kemungkinan tingkah laku atau kejadian yang mempunyai hubungan stimulus dan situasi yang sama akan terjadi.

Maksudnya disini apabila pengawasan mengenai peminjaman itu lemah suatu ganjaran nilai kurang maka responden tidak akan mau mengembalikan dana tersebut. Sebaliknya apabila responden mendapatkan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh petugas UPK/LKM terhadap responden. Makin bernilai bagi responden suatu tingkah laku yang ditujukan kepadanya makin besar kemungkinan atau makin sering responden melakukan tingkah lakunya.

Adapun usaha yang dijalankan responden sampai sekarang ini berjalan dengan baik persentasenya yaitu 22,6% (7 responden). Tetapi responden mengalami penunggakan tidak mau membayar angsuran dana dan responden tidak mau mengembalikan dana PNPM-MP. Disisi lain faktor kegagalan responden yaitu responden tidak memiliki usaha dengan presentase 6,5% (3 responden). Apabila responden mengembalikan dana PNPM-MP mereka akan bisa meminjam dana secara lebih besar.

Pemilihan usaha sebagai peminjaman dana PNPM-MP merupakan bagian ekonomi yang dapat dijelaskan dengan teori George Pascar Homans yang memandang perilaku sosial sebagai perilaku mengenai aktivitas dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Teori ini berangkat asumsi ekonomi dasar (pilihan rasional) yaitu individu memberi apa dan mendapatkan apa, apakah menguntungkan atau tidak (Ritzer 2009:458). Unsur utama yang digunakan peminjam yang menunggak di Kelurahan Sail adalah cost (biaya) reward

(imbalan) dan profit (keuntungan). Cost adalah perilaku peminjam dana yang menunggak sebagai biaya, sedangkan reward adalah imbalan terhadap cost. Sedangkan profit (keuntungan) adalah reward yang dikurangi oleh biaya (Irving M. Zeitlin 1995:99). Analisis pertukaran sosial mengenai peminjam menunggak menjelaskan adanya pertukaran cost (biaya) dan reward (ganjaran) terhadap pilihan usaha di Kelurahan Sail. Mereka mengalami penunggakan mengenai peminjaman dana PNPM-MP disebabkan cost (biaya) yang dikeluarkan hanya uang pemerintah sedangkan reward (ganjaran) mereka tidak mendapat ganjaran tersebut dari pihak pengelola sehingga usaha mereka tidak berjalan dan tidak memiliki keuntungan.

Usaha yang dijalankan tidak sesuai kemampuan, responden tidak mengetahui mengenai keuntungan usaha, tidak ada keinginan responden untuk menggantikan usaha, adanya keterlambatan pengembalian uang pinjaman, pinjaman dana PNPM-Mandiri Perkotaan berupa uang hibah.

Sebagian kecil usaha responden masih berjalan dengan baik tetapi responden tidak mau mrngembalikan dana pinjaman PNPM-MP karena masih ada anggapan uang hibah dari pemerintah. Kurangnya Solidaritas Kelompok tujuan dari pinjaman bergulir kelompok yaitu untuk memotivasi peminjam lainnya untuk mengembangkan usaha. Dengan pinjaman yang berkelompok mereka saling mengetahui usaha satu sama yang lain, sehingga mereka termotivasi untuk mengembangkan usaha. Faktor kegagalan peminjam dana PNPM-MP yaitu kurangnya solidaritas kelompok. Kesolidaritasan kelompok sangat diperlukan untuk membentuk kerja sama pinjaman dana ekonomi berkelompok ini. Teori kebutuhan McClelland berfokus pada tiga kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan berprestasi: dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil.
- b. Kebutuhan berkuasa: kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya.
- c. Kebutuhan berafiliasi : keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab ([wikipedia/Motivasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi)).

McClelland mengatakan bahwa kebutuhan yang kuat akan afiliasi akan mencampuri objektivitas seseorang. Sebab, jika ia merasa ingin disukai, maka ia akan melakukan apapun agar orang lain suka akan keputusannya.

Kelompok peminjam kurangnya suatu kosolidaritas antara anggota dikarenakan yang dikatakan teori McClelland kurangnya kebutuhan berprestasi para anggota peminjam yang menunggak. Diperlukan suatu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar dan berusaha untuk keberhasilan, tetapi pada kelompok peminjam ekonomi bergulir kelompok tidak terdapatnya motivasi kebutuhan prestasi.

Kebutuhan berkuasa dimana kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak berilaku sebaliknya. Baik ketua kelompok maupun individu baik memiliki usaha yang produktif maupun tidak produktif. Tidak terbentuknya motivasi akan berkuasa memotivasi sesama peminjam dana PNPM-MP untuk lebih mengembangkan usaha. Maksudnya ada satu orang dari kelompok mampu berkuasa untuk memotivasi anggota lainnya

membayar angsuran tunggakan dengan memotivasi kalau mereka mampu membayar dan mengembangkan usahanya seperti kelompok yang lancar sampai sekarang bisa meminjam dana yang lebih besar dan mampu mengembalikan dana tersebut. Ataupun membentuk kerja sama mencari solusi untuk mendapatkan dana yang lebih besar dan diiringi usaha yang dikembangkan berjalan dengan baik.

Kebutuhan berafiliasi yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Untuk membentuk kesolidaritasan kelompok perlu adanya suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab antar ketua dengan anggota maupun dengan kelompok lainnya. Sehingga termotivasi memanfaatkan pinjaman dana PNPM-MP yang bersasaran meningkatkan usaha mikro menambah pendapatn keluarganya.

Sebaliknya yang ditemukan tidak ada kesolidaritas kelompok itulah salah satu penyebab kegagalan. Kurangnya perencanaan mengenai usaha dan pengawasan pengelola PNPM-MP karena kurangnya pengawasan, sosialisasi, pengecekan dan *monitoring* kelapangan mengenai usaha responden sehingga terjadinya penunggakan. Dengan pengawasan yang lemah, kurangnya sosialisai mengenai ketentuan pinjaman bergulir maupun mengenai usaha dan ditambah lagi pengecekan, responden peminjam dana yang menunggak enggan untuk mengembalikan dana PNPM-MP.

8. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai dana pinjaman ekonomi bergulir kelompok di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya di dasarkan pada penelitian yang dilakukan penulis pada September 2013 dengan melakukan observasi di lapangan, serta penyebaran kusioner dengan mengambil 31 responden yang menunggak dalam pinjaman dana ekonomi bergulir kelompok PNPM-MP dari masyarakat Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya. Dan dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Sail sebagai berikut:

- a. Tidak tepat sasaran
- b. Kurangnya keterbukaan mengenai dana pinjaman
- c. Kurangnya pengawasan, pelatihan, sosialisasi, pengecekan dan *monitoring* kelapangan
- d. Tidak mengetahui ketentuan skim peminjaman dana PNPM-MP.
- e. Usaha yang tidak produktif
- f. Adanya anggapan uang hibah dari pemerintah
- g. Kurangnya solidaritas kelompok

9. SARAN

- a. Pengelola PNPM-MP, diharapkan lebih memahami ketentuan umum mrngenai program PNPM-MP agar lebih cermat lagi bantuan pinjaman dana PNPM-MP lebih pada tepat sarannya.
- b. Pengelola PNPM-MP lebih terbuka lagi mengenai siklus keuangan dana pinjaman bergulir. Agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan atau

korupsi mengenai dana PNPM-MP bertujuan dengan adanya keterbukaan anatara pihak pengeloah dengan pihak umum atau masyarakat. Sehingga tujuan dari program ini tercapai tentunya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

- c. Pihak pengelola program PNPM-MP Kelurahan Sail diharapkan pengawasan, pelatihan, monitoring lapangan dan pengecekan usaha harus diadakan seperlunya, apabila ada permasalahan dilapangan seharusnya diadakan secara keseringan agar tidak terjadi penunggak dan mencapai tujuan dari prorgram itu tercapai.
- d. Adapun saran lainnya pemerintah kota Pekanbaru diharapkan menggalakan lagi program PNPM-MP ini dengan adanya pelatihan-pelatihan mengenai berwirausaha, dengan cara mendatangkan pihak luar atau tokoh yang berhasil dalam berwirausaha agar masyarakat termotivasi untuk mengembangkan usaha mikro. Menghilangkan anggapan uang hibah dari pemerintah.
- e. Bagi peminjaman mehlangkan anggapan uang hibah dari pemerintah.
- f. Kesolidaritasan kelompok peminjam harus ditingkat untuk memotivasi satu sama yang lain, baik antara ketua dengan anggota maupun kelompok dengan kelompok lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto. 2001. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Arif, Budiman. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ginandjar, Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : PT Pustaka Cindesindo.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnaka, Adimihardja. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Tim Crescent, 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkarnain, 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Ardana Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundangan :

- UU NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Kepmen Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No 25/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
- Tim Koordinasi Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir PNMP-Mandiri Perkotaan 2008.